

Good Corporate Governance dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Khairani Siregar¹, Ovia Tinalita Tarigan², Jenny Panjaitan³, Annastasya Siregar⁴, Anggi swintaro⁵, Wilchan Robain⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

E-mail: khairaniisiregar4@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.70292/pctif.v3i1.42>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10 Mei 2025

Revised: 14 Mei 2025

Accepted: 20 Mei 2025

Kata Kunci

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Prinsip-Prinsip GCG, Tanggung Jawab Sosial perusahaan, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Keywords

CSR, CSR disclosure, good corporate governance, and the principles of good corporate governance.

ABSTRACT

Evolusi tata kelola perusahaan merupakan akar penyebab krisis yang mengguncang perusahaan-perusahaan besar di Amerika serta Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar ini berada dalam bahaya karena norma-norma tata kelola perusahaan yang longgar, merger dengan beberapa bank besar, dan kerusakan lingkungan yang dilaksanakan oleh berbagai perusahaan yang terlibat dengan sumber daya alam yang harus dibayar oleh pemerintah. Tata kelola perusahaan yang buruk di AS sebagian besar disebabkan oleh perilaku manajemen tingkat atas, seperti yang diperlihatkan oleh Enron. Bertujuan untuk mendorong pasar yang efisien dan transparansi, tata kelola perusahaan yang sukses menganut cita-cita keadilan, akuntabilitas, tanggung jawab, serta keterbukaan. Mempraktikkan tanggung jawab sosial perusahaan ialah pendekatan yang cerdas untuk mengelola perusahaan. Sebuah laporan yang disebut laporan keberlanjutan harus disiapkan dan dimasukkan dalam laporan tahunan perusahaan dalam mencatat pelaksanaannya. Perusahaan yang peduli dengan komunitasnya serta berupaya untuk memperbaikinya memperlihatkan bahwasanya mereka mempunyai praktik tata kelola perusahaan yang baik.

The evolution of corporate governance was the root cause of the crises that rocked major American and Indonesian companies. This massive corporation is in jeopardy because to its lax corporate governance norms, its mergers with several big banks, and the environmental damage that various corporations involved with natural resources have caused the government to pay for. Poor corporate governance in the US is mostly attributable to the behaviour of upper management, as was shown at Enron. Aiming to promote an efficient market and transparency, successful corporate governance adheres to the ideals of fairness, accountability, responsibility, and openness. Practicing corporate social responsibility is an astute approach to managing a company. A report called sustainability reporting should be prepared and included in the company's annual report to record the implementation. Companies that care about their communities and work to improve it show that they have good corporate governance practices.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Krisis yang mengguncang perusahaan-perusahaan besar di Amerika dan Indonesia telah membuat frasa good corporate governance menjadi sangat populer. Beberapa perusahaan Indonesia mengalami masalah ataupun gulung tikar karena pelaksanaan proses tata kelola perusahaan yang ceroboh. Beberapa contohnya ialah bank-bank milik negara yang dimerger ataupun dilikuidasi, seperti PT Indorayon di Sumatera Utara, PT Dirgantara di Bandung, dan PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. Strategi pertumbuhan kredit yang gegabah dari para eksekutif bank tersebut menjadi penyebab runtuhnya sejumlah bank milik negara. Bank-bank mengalami kesulitan keuangan dikarenakan ketidakmampuan kelompok-kelompok perusahaan besar untuk membayar kembali pinjaman serta bunganya setelah menerima sejumlah besar uang dari para kreditur tanpa terlebih dahulu menilai

kelayakan kegiatan mereka. Pabrik kertas besar PT Indorayon bangkrut dikarenakan penanganan yang ceroboh terhadap pohon-pohon pinus di sekitar Danau Toba, yang memasok kertas untuk perusahaan. Ekologi hutan rusak dan sistem pengelolaan air di sekitar Danau Toba terganggu akibat pengelolaan pohon pinus yang tidak memadai atau tidak tepat. Mata pencaharian masyarakat setempat terganggu akibat turunnya permukaan air Danau Toba secara signifikan. Akibat renggangnya hubungan dengan masyarakat sekitar lokasi pasokan bahan baku, masyarakat pun marah dan memerintahkan pabrik untuk ditutup, sehingga PT Indorayon tidak dapat beroperasi lagi.

Hal ini terjadi pada PT Lapindo Brantas, yang pemakaian sumber daya minyak serta gas Sidoarjo secara ceroboh mengakibatkan kematian penduduk setempat dan kerusakan lingkungan yang meluas. Aturan-aturan ini bisa menimbulkan tuntutan hukum dari masyarakat, yang membahayakan eksistensi perusahaan. Sejumlah skandal terkenal yang melibatkan para eksekutif tingkat tinggi di perusahaan-perusahaan Amerika-termasuk Enron, Worldcom, London Commonwealth, Polypeck, Maxwel, serta yang lainnya-mengilustrasikan kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta mendorong seruan untuk mengadopsinya. Butuh waktu lama untuk kegiatan penipuan, keputusan strategis yang buruk, serta kurangnya pengawasan independen oleh dewan perusahaan menyebabkan organisasi-organisasi ini jatuh.

Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan respons terhadap tata kelola perusahaan yang buruk, serta sebagai akibatnya, masyarakat sering kali menuntut lebih banyak akuntabilitas serta keterbukaan dari perusahaan. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, terbuka, dan taat hukum. Oleh karenanya, negara sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, serta masyarakat sebagai konsumen produk dan jasa perusahaan merupakan tiga pilar yang saling terkait yang harus mendukung pelaksanaan GCG.

Setiap pilar harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar berikut:

1. Negara serta birokrasinya, yang membuat dan sering kali menegakkan peraturan serta regulasi, berkontribusi terhadap iklim usaha yang sehat, efektif, dan transparan.
2. Para pelaku pasar di sektor bisnis mengadopsi GCG sebagai pedoman dasar dalam operasi perusahaan.
3. Ada kontrol sosial yang bertanggung jawab serta disengaja oleh masyarakat, termasuk mereka yang terkena dampak keberadaan perusahaan serta mereka yang memanfaatkan produk dan jasanya.

Dalam hal tata kelola perusahaan yang baik, dua aliran pemikiran utama ialah teori pengelolaan serta teori keagenan. Michael Johnson mengajukan tesis keagenan, yang menyatakan bahwasanya “manajemen bukanlah pihak yang masuk akal dan adil, melainkan agen bagi para pemegang saham, dan ini berarti manajemen akan beroperasi dengan cara yang mementingkan diri sendiri”. Landasan teori pengelolaan adalah gagasan tentang sifat manusia, yang menyatakan bahwa manusia dapat dipercaya, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Di mana orang percaya bahwa manajemen akan bertindak demi kepentingan terbaik publik dan pemangku kepentingan.

Konsekuensi tak terduga dari praktik-praktik perusahaan yang mengutamakan keuntungan di atas tanggung jawab sosial serta lingkungan meliputi perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, penggundulan hutan, kerusakan area di sekitar lokasi pertambangan, polusi udara dari limbah berbahaya, pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak, kebakaran hutan yang dilakukan secara sembarangan, tumpahan minyak dari kapal tanker yang bocor di lautan, dan banyak lagi masalah lainnya. Sebagai reaksi terhadap operasi komersial perusahaan yang telah merusak masyarakat dan planet ini, penelitian yang mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan konsep-konsep serupa telah muncul. Istilah corporate social responsibility (CSR) mengacu pada kewajiban perusahaan terhadap pemilik/pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas. Kewajiban ini terpenuhi ketika bisnis meningkatkan keuntungan serta memperluas operasinya, yang pada gilirannya bermanfaat bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang. Ini berarti bahwa bisnis industri harus mempertimbangkan dimensi sosial dan lingkungan perusahaan di samping aspek keuangannya (laba). Sesuai dengan teori triple bottom line milik Elkington, yang mengutamakan laba, manusia, dan lingkungan. Sebuah laporan berjudul Sustainability Reporting merinci bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dilaksanakan. Hal ini perlu disebutkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.

Sukrisno Agoes (2009) mengutip definisi Good Corporate Governance (GCG) dari British Cadbury Committee “sebagai kode etik yang menguraikan peran dan tugas masing-masing pihak yang

terlibat dalam manajemen dan operasi organisasi, termasuk pemegang saham, kreditur, pemerintah, serta para pekerja". Dengan kata lain, GCG ialah sebuah kerangka kerja untuk menjalankan sebuah perusahaan. Merujuk Agoes dan Sukrisno (2009), tata kelola perusahaan yang baik memberikan struktur yang mengatur hubungan antara tanggung jawab pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Nama lain dari tata kelola perusahaan yang baik (GCG) ialah metode yang terbuka dan jujur untuk mencapai, menyelesaikan, serta mengevaluasi tujuan bisnis. Agoes dan Sukrisno (2009) "mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai kewajiban perusahaan terhadap pemilik/pemegang saham, karyawan, dan masyarakat, yang ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan menghasilkan laba". Meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang ialah bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

CSR didefinisikan oleh sejumlah organisasi (Sukada dan Jalal, 2008; Wikipedia, 2008; Majalah Bisnis dan CSR, 2007).

World Business Council for Sustainable Development: Misi World Business Council for Sustainable Development ialah guna mempromosikan praktik bisnis yang etis yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup semua orang.

International Finance Corporation: Komitmen perusahaan terhadap kesuksesan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan kesejahteraan karyawan, keluarga, komunitas, serta masyarakat luas melalui upaya bersama yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat.

Institute of Chartered Accountants, England and Wales: Jaminan bahwa, selain meningkatkan keuntungan pemegang saham, organisasi manajemen bisnis bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Canadian Government: Upaya yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengembangkan masyarakat yang sehat dan sukses dengan secara bertanggung jawab dan transparan memasukkan isu-isu sosial, lingkungan, serta ekonomi ke dalam budaya, strategi, pengambilan keputusan, dan operasi perusahaan.

European Commission: Gagasan bahwa perusahaan harus mengintegrasikan kepedulian terhadap lingkungan serta sosial ke dalam operasi dan interaksi dengan pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip sukarela.

CSR Asia: Komitmen perusahaan untuk mengelola kegiatannya dengan cara yang berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menyeimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

Darwin menyatakan dalam Theowordpress (2004) bahwasanya pelaporan berkelanjutan perusahaan ialah praktik pelaporan tentang kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta kinerja dan dampak perusahaan dan barang-barangnya dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mengacu pada publikasi informasi yang sangat penting bagi operasi pasar keuangan yang efisien. Publikasi inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah persyaratan dari semua laporan keuangan tahunan perusahaan.

METODE

Metode penelitian yang dipakai dalam dokumen ini adalah kajian literatur, yang melibatkan proses sistematis dalam mengidentifikasi, mencari, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan, untuk membangun landasan teoritis yang kuat, mendukung argumen, dan memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep Good Corporate Governance (GCG) serta Corporate Social Responsibility (CSR) serta hubungan di antara keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai insiden atau kontroversi yang melibatkan bisnis besar baik lokal maupun internasional yang diakibatkan oleh penggunaan teknik manajemen perusahaan yang buruk memunculkan tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik berikut ini pada awalnya dikembangkan oleh OECD serta sejak saat itu telah diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Aturan-aturan ini disusun sedemikian rupa sehingga relevan bagi setiap negara atau perusahaan, dan sesuai dengan aturan, peraturan, serta nilai-nilai yang berlaku di negara mana pun.

Di antara prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah:

1. Akuntabilitas (Accountability). Tanggung jawab kepada pemegang saham serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, serta kekuasaan yang harus dimiliki oleh dewan direksi dan komisaris,

- diuraikan dalam prinsip ini. Guna memenuhi tujuan para pemegang saham, perusahaan harus dikelola dengan baik, yang merupakan tanggung jawab dewan direksi. Guna memastikan sasaran organisasi tercapai, ialah tanggung jawab Dewan Komisaris untuk mengawasi perusahaan secara efektif dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai manajemen bisnis. Pemegang saham bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang efektif dalam kerangka kerja manajemen perusahaan.
2. Akuntabilitas Agar perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang serta dikenal sebagai Good Corporate Citizen, prinsip ini mengharuskan perusahaan beserta para manajer dan pemimpinya untuk menjalankan operasinya secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Setiap biaya transaksi yang dapat membahayakan pihak ketiga atau pihak yang tidak tercakup dalam ketentuan yang disepakati yang tercantum dalam undang-undang, peraturan, kontrak, atau standar operasional bisnis perusahaan menjadi tanggung jawab Anda sebagai manajer.
 3. Keterbukaan Berdasarkan asas ini, suatu korporasi harus secara efisien dan akurat mempublikasikan informasi yang signifikan serta relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan guna menjaga objektivitas dalam menjalankan usahanya. Informasi yang diungkapkan meliputi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, kinerja keuangan, dan situasi keuangan. Investigasi terhadap data ini dilakukan secara mandiri. Untuk meningkatkan nilai saham pemegang saham, transparansi dijaga agar setiap orang, termasuk pemegang saham, mengetahui kondisi usahanya.
 4. Adil Perusahaan berhutang kepada semua pemangku kepentingannya untuk memperlakukan mereka secara setara. Menerapkan prinsip ini dalam organisasi akan mencegah orang dalam terlibat dalam tindakan yang tidak pantas dan berbahaya. Harus ada transparansi penuh jika seorang anggota dewan mengetahui mengenai suatu transaksi yang bisa menimbulkan bias.

Selain untuk menilai kinerja perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik (GCG) berusaha agar menghindari ataupun mengurangi manipulasi dan kesalahan besar dalam manajemen organisasi, melaksanakan lebih banyak upaya untuk melindungi para pemangku kepentingan, dan menghasilkan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Pada prinsipnya, kebijakan GCG bisa meningkatkan nilai perusahaan (worth added), mengacu Tjager et al. (2003) (dalam Sukrisno Agoes, 2009), yang merupakan salah satu keuntungan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Akhir-akhir ini terjadi peningkatan tekanan publik untuk lebih terbuka dan akuntabel dari perusahaan dalam upaya memacu pengembangan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Perusahaan dapat menerapkan GCG dengan berbagai cara, salah satunya melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Di era globalisasi ini, terdapat peningkatan kepedulian masyarakat terhadap produk dan jasa yang ramah lingkungan, dan seiring dengan itu, pemahaman tentang bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipraktikkan. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mengacu pada janji organisasi untuk melakukan hal yang benar bagi masyarakat serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Meningkatkan standar hidup bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pekerja dan keluarga mereka, merupakan salah satu tujuan perusahaan. Dengan dukungan penuh dari manajemen senior, CSR sebagai bentuk tanggung jawab publik dapat membantu membawa perusahaan ke dalam keselarasan dengan masyarakat di sekitarnya.

Masalah akuntabilitas, atau kepatuhan manajemen bisnis terhadap peraturan dan ketentuan yang relevan serta prinsip-prinsip perusahaan yang baik, merupakan salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan-perusahaan akhir-akhir ini menunjukkan kecenderungan untuk mengabaikan tiga masalah publik. Pertama, satu-satunya akuntabilitas perusahaan adalah kepada para pemegang sahamnya; lingkungan tempat perusahaan itu berada kurang mendapat perhatian. Kedua, meskipun sebagian besar keuntungan diberikan kepada para pemegang saham, masyarakat lokal dibiarkan menghadapi semakin banyaknya konsekuensi negatif yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Ketiga, meminta pihak yang bersalah untuk membayar adalah hal yang sulit untuk dipecahkan bagi sebagian besar korban. Pengabaian terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis terhadap masyarakat dan planet tempat manusia hidup telah menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, perusakan hutan, kerusakan wilayah sekitar pertambangan, pencemaran air akibat limbah beracun, polusi udara akibat pembakaran hutan secara serampangan, dan pencemaran air laut akibat tumpahan minyak dari kebocoran kapal tanker. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta analisis pemangku kepentingan adalah tanggapan terhadap kegiatan atau operasi perusahaan yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan

(CSR) mengacu pada kewajiban perusahaan terhadap pemilik/pemegang saham, pekerja, dan masyarakat luas. Kapasitas perusahaan untuk berkembang dan menghasilkan laba menunjukkan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Begitu pula dengan potensinya guna menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan melindungi lingkungan bagi generasi berikutnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah menjadi kata kunci di Indonesia sejak tahun 1990. Memang, inisiatif CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) telah berlangsung cukup lama di berbagai jenis bisnis. Kegiatan mereka mirip dengan “partisipasi” serta “kepedulian” perusahaan terhadap elemen sosial dan lingkungan, yang dekat dengan gagasan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), tetapi istilah ini tidak digunakan. Sebagai contoh, mereka berkontribusi pada organisasi yang membantu para lansia, anak-anak yang membutuhkan serta mereka yang hidup dalam kemiskinan, mereka membantu masyarakat yang terkena bencana alam, dan mereka membantu rumah-rumah ibadah. Tak hanya perusahaan yang terlibat dalam kegiatan sosial, lembaga pendidikan juga melakukannya. Misalnya, mereka menawarkan pelatihan komputer dan teknologi informasi di masyarakat tempat mereka berada, menawarkan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, dan memberikan pelatihan bagi usaha kecil dan menengah. Semua kegiatan ini dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk memberdayakan dan meningkatkan keterampilan masyarakat setempat. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah menjadi semakin penting bagi banyak perusahaan, meskipun beberapa orang menentanginya. Berbagai pihak memiliki gagasan yang berbeda mengenai seberapa besar keterlibatan individu agar perusahaan dapat mengimplementasikan inisiatif CSR, bahkan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa perusahaan harus terlibat dalam CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan luasnya program-programnya dipengaruhi oleh sejauh mana para pelaku bisnis dan pemangku kepentingan penting lainnya memiliki pengetahuan. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) didasarkan pada tujuh prinsip: perlindungan lingkungan, kemajuan sosial, hak asasi manusia, praktik bisnis yang adil, perlindungan konsumen, dan tata kelola organisasi. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat didefinisikan sebagai berikut, dengan mengembangkan ide Triple Bottom Lines (Elkington, 1998) untuk memasukkan prosedur: Kepedulian perusahaan yang, sesuai dengan proses yang sesuai serta ahli, mengalokasikan persentase dari pendapatan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang manusia dan dunia. Konsep 4P ini dapat digunakan bersama dengan komponen ISO 26000. Ada hubungan yang jelas antara lingkungan dan gagasan planet. Istilah “masyarakat” dapat digunakan untuk merujuk pada hak asasi manusia dan pembangunan sosial, yang tidak hanya terkait dengan kesejahteraan finansial masyarakat (misalnya, modal usaha, pelatihan keterampilan kerja). Namun, kesejahteraan sosial (misalnya, jaminan sosial, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kemampuan lembaga sosial, dan pengetahuan lokal) sangat penting. Di sisi lain, tata kelola organisasi, praktik ketenagakerjaan, metode operasi yang adil, dan isu konsumen semuanya dapat dimasukkan dalam konsep prosedur.

Dunia usaha ataupun industri harus melaksanakan hal ini, meskipun persyaratannya tidak memberatkan. Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab negara dan perusahaan; setiap individu memiliki peran dalam mencapai kesejahteraan sosial dan mengelola kondisi kehidupan masyarakat. Ketika perusahaan dan industri memikirkan lingkungan, hal ini akan membantu perekonomian berkembang dengan cara yang sehat. Saat ini, perusahaan memikirkan lebih dari sekadar keuntungan. Mereka melihat kinerja keuangan, tanggung jawab sosial, dan dampak lingkungan, yang semuanya merupakan bagian dari apa yang disebut “triple bottom line”. Ketiga komponen ini harus bekerja sama agar pembangunan berkelanjutan menjadi konsep yang layak. Inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) harus dirinci dalam laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, “laporan keberlanjutan” merinci bagaimana sebuah bisnis beroperasi serta dampak yang ditimbulkan oleh produknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Laporan mengenai keberlanjutan harus berupa dokumen strategi tingkat tinggi yang menyoroti kemungkinan, masalah, dan tantangan.

Menurut Darwin (2004) dalam Theowordpower (2008), ada tiga kategori yang termasuk dalam Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan: kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi. Zhegaf dan Ahmed (1990) mencantumkan isu-isu berikut mengenai pelaporan sosial perusahaan:

1. Lingkungan, yang mencakup pengungkapan yang berkaitan dengan pelestarian satwa liar, pencegahan atau perbaikan polusi, dan topik-topik lain yang berkaitan dengan lingkungan.
2. Energi, yang mencakup efisiensi energi, konservasi, serta konsep terkait lainnya.

3. Praktik perusahaan yang benar, termasuk inisiatif keberagaman dan inklusi, tanggung jawab sosial, serta pemberdayaan minoritas dan perempuan.
4. Sumber daya manusia, terutama upaya akar rumput di bidang kesehatan, pendidikan, dan desain produk (misalnya, kampanye untuk mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan keamanan).

Pengungkapan, menurut Hendriksen (2004), adalah penyajian berbagai informasi yang dibutuhkan agar pasar modal yang efektif dapat berfungsi dengan baik. Terdapat pengungkapan wajib, yaitu informasi yang harus disediakan oleh perusahaan sesuai dengan aturan atau pedoman tertentu, dan pengungkapan sukarela, yaitu informasi yang melampaui batas minimum yang dipersyaratkan oleh undang-undang terkait. Menurut paragraf sembilan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2004, setiap unit atau pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab sosial selain berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dan melayani kepentingan pemegang saham. Hal ini harus diungkapkan dalam laporan tahunan "Perusahaan juga dapat menyediakan laporan lain, seperti laporan nilai tambah dan laporan lingkungan, terutama untuk industri yang faktor lingkungannya signifikan dan untuk industri yang memandang karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memainkan peran signifikan." Perusahaan biasanya melakukan pengungkapan sosial secara sukarela, tidak diaudit, dan tidak terkendali. Menurut Glouter dalam Utomo (2000), tema-tema berikut dibahas dalam konteks akuntansi tanggung jawab sosial:

1. Komunitas Tema ini mencakup keterlibatan perusahaan dalam komunitas, seperti kesehatan, pendidikan, dan usaha-usaha artistik, serta pengungkapan kegiatan-kegiatan komunitas lainnya.
2. Ketenagakerjaan Tema ini mencakup dampak operasi bisnis terhadap karyawan. Operasi-operasi ini meliputi perekrutan, pelatihan, tuntutan dan gaji, promosi dan mutasi, dan lain-lain.
3. Produk dan Pembeli semua aspek kualitatif dari suatu produk atau jasa yang berkaitan dengan penggunaan, daya tahan, layanan, kebahagiaan pelanggan, kejujuran iklan, kejelasan kemasan, serta kelengkapannya tercakup dalam tema ini.
4. Masalah ini tidak hanya mencakup pertimbangan lingkungan dari proses produksi, tetapi juga pengelolaan polusi di dalam operasi bisnis serta mitigasi bahaya terhadap lingkungan sebagai akibat dari ekstraksi, pemrosesan, dan transformasi sumber daya.

Kewajiban perusahaan kepada para pemegang sahamnya adalah memaksimalkan keuntungan dari semua upaya manufaktur. Guna memastikan bahwa tidak ada pihak yang terkena dampak negatif, perusahaan juga harus mempertimbangkan bagaimana operasi manufaktur ini dapat memengaruhi lingkungan, terutama lingkungan di sekitar perusahaan. Perusahaan sekarang diharapkan untuk memikul tanggung jawab atas dampak dari kegiatan mereka terhadap lingkungan tempat mereka beroperasi, daripada hanya mengandalkan kesukarelaan. Manajemen bisnis ialah sebuah rangkaian kepedulian. Dengan kata lain, bisnis yang menghargai komunitas dan lingkungan sosialnya telah mengadopsi tata kelola perusahaan yang baik. Sebuah laporan yang disebut Pengungkapan CSR, yang disertakan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan, merinci bagaimana tanggung jawab sosial, atau CSR, sedang dilaksanakan. Investor lebih menyukai bisnis seperti ini. Karena investor percaya bahwa bisnis yang telah memasukkan tanggung jawab sosial telah melakukannya dengan cara yang menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan kata lain, bisnis tersebut telah berhasil menerapkan konsep tata kelola perusahaan yang baik.

SIMPULAN

1. Tata kelola perusahaan yang baik muncul sebagai tanggapan atas skandal yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar di Amerika dan Indonesia, seperti Enron Wordcom, London Commonwealth, Polypeck, dan Maxwel, serta Indorayon di Sumatera Utara, Lapindo Brantas di Jawa Timur, PT Dirgantara di Bandung, dan penggabungan atau peleburan beberapa bank negara.
2. Sistem aturan yang dikenal sebagai "tata kelola perusahaan yang baik" mengatur hak dan tanggung jawab pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya. Atau dengan kata lain, sistem yang membimbing dan mengelola bisnis
3. Tiga pilar utama yang mendukung pelaksanaan GCG: masyarakat sebagai konsumen barang dan jasa pelaku usaha, negara sebagai regulator, dan korporasi sebagai pelaku pasar.
4. Akuntabilitas, tanggung jawab, keterbukaan, dan keadilan merupakan salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

5. Sesuai dengan “Pasal 74 UU Perseroan Terbatas, UU No. 25 tentang Pasar Modal, dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu prinsip GCG”.
6. Laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan yang dikenal sebagai pelaporan keberlanjutan harus mengungkapkan pelaksanaan CSR perusahaan.
7. Pengungkapan tanggung jawab social perusahaan dinyatakan dalam PSAK No.1 Tahun 2004 pasal ke sembilan.
8. Perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan social dan masyarakat berarti telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.

REFERENSI

- Agoes Sukrisno. 2009. Etika Bisnis dan Profesi. Salemba Empat.
- Chairil N. Siregar. 2007. Analisa Sosialogis terhadap Implementasi CSR pada Masyarakat Indonesia. Jurnal Sositoknologi. Edisi 12 tahun 6. Desember 2007.
- Corporate Social Responsibility. http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility (diakses 20 Februari 2008).
- Ernawan, E. (2014). Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa, 11(2).
- Hastuti, N. (2016). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 Dan 2014). Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi, 4(7).
- M, Arief Effendi. 2006. “Implementasi GCG melalui CSR”. Suara Karya. Rubrik Opini. Edisi Rabu 15 Maret 2006.
- Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. 2006. Komite Nasional Kebijakan Governance
- THEOWORDPOWER’WEBLOG. 2008. “Mengungkap Praktek Corporate Social Responsibility dan Prospek Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan“. April 04, 2008. Wikipedia (2008),
- Thomas S. Kaihatu. 2006. ” Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”. Jurnal Manajemen dan Wirausaha, Vol.8, No 1. Maret 2006:1-9.
- Yuniasih, Ni Wayan dan Wirakusuma, Made gede. 2009. ”Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan CSR dan GCG sebagai Variable Pemoderisasi “. Universitas Udayana, Bali. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 4 no.1, Januari 2009.